

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH,
DAN PENGAWAS SEKOLAH DI SMPN 3 DOPLANG KABUPATEN
BLORA

Oleh

Achmad Dimhari

Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: adimhari@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed the implementation of face-to-face (offline) learning to be done with distance learning or online learning. This research is a qualitative research that aims to describe how the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 15 of 2018 at SMPN 3 Doplang. The results of the study obtained: Communication indicators have been implemented effectively, both transformation, clarity, and consistency. Resource indicators have not been implemented properly, there is a shortage of civil servant teachers, still need to improve competence, and lack of infrastructure. Disposition indicators have been implemented well, policy implementers have shown their commitment in carrying out their duties. Indicators of the bureaucratic structure have been implemented with.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

Pendahuluan

Mewabahnya virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya,

proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa.

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease (COVID-19)* menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu

saja harus terhubung dengan koneksi internet.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 pasal 1 mengamanatkan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan komponen paling penting yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa. Guru dituntut siap dan memiliki kompetensi dalam memberikan bahan ajar di segala situasi. Namun, pandemi *covid19* merupakan permasalahan baru bagi guru dengan merubah metode pembelajaran yang belum dialami sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi keoptimalan kinerja guru. Dari permasalahan tersebut, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dari kelangsungan lembaga pendidikan harus memberikan upaya agar dalam pelaksanaan belajar mengajar daring dapat memberikan pembelajaran yang optimal bagi siswa, serta kepala sekolah harus mengupayakan terciptanya kinerja guru yang baik agar dapat menunjang kelangsungan pembelajaran siswa serta kelangsungan lembaga pendidikan di masa pandemi.

Observasi awal wawancara dengan waka kurikulum SMPN 3 Doplang mengungkapkan banyak kendala yang dialami bapak ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran online saat ini. Keterbatasan

pengetahuan aplikasi pembelajaran menjadi kinerja guru tidak maksimal. Sinyal internet menjadi kendala utama dalam pembelajaran daring ini. Rata-rata keikutsertaan siswa hanya 30% dari sejumlah siswa yang bisa mengikuti pembelajaran daring secara aktif. Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah di SMPN 3 Doplang Kabupaten Blora Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah dari kebijakan publik dibidang pendidikan dan kebudayaan. Carl J. Federick sebagaimana dikutip Taufiqurohman (2014:2) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan /kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye dalam Suwitri (Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik, MAPU5301/MODUL 1, hal 7-8) Kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan". Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan George

C.Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik, MAPU5301/MODUL 1, hal 7-8) Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam *policy statemen* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

Menurut Taufiqurokhman (2014:16) proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Jones dalam Suwitri (modul 1 hal 1.21) mengemukakan sebelas (11) tahapan dalam proses kebijakan publik, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan *termination*. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1. *Perception/definition*, mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik. Manusia menghadapi masalah karena ada kebutuhan (*needs*) yang tidak dapat dipenuhi.

Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka *welfare state*. Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap prakiraanprakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (*public problems*) sangatlah kompleks, pembuat kebijakan sering mengalami kesulitan membedakan antara masalah dan akibat dari masalah.

2. *Aggregation*, tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan melalui penulisan di media masa, penelitian atau orasi.
3. *Organization*, mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.
4. *Representation*, mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke *agenda setting*.
5. *Agenda Setting*, terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan.
6. *Formulation*, tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat didefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai) yang dilakukan melalui negosiasi,

bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.

7. *Legitimation*, proses pengesahan dari alternatif yang terpilih (*public policy decision making*).
8. *Budgeting*, penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasuistis di mana anggaran disediakan di tahap awal sebelum *perception* atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas.
9. *Implementation*, kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.
10. *Evaluation*, menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan tahap di mana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring.
11. *Adjustment/Termination*, tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau mengalami gagal total. Selanjutnya, Dunn dalam Sri Hadiati (2015:15) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:
 - (1) Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dengan

menentukan masalah publik apa yang akan diselesaikan;

- (2) Formulasi kebijakan, dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui *proses forecasting* (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan);
- (3) Adopsi kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan;
- (4) Implementasi kebijakan, tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumberdaya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada tahap ini, proses pemantauan (*monitoring*) kebijakan dilakukan;
- (5) Evaluasi kebijakan, adalah tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan yang telah diimplementasikan

Implementasi Kebijakan Publik menurut Edwards III dalam Yulianto Kadji (2015:46-50) “*The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was*

designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers”.

“Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya”.

Van Metter dan Van Horn dalam Yulianto Kadji (2015:46-50) menyatakan bahwa:

“Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja”.

Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan”.

Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (*policy implementation*), Yulianto Kadji (2015:53) mendeskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik:

1. Model Van Meter dan Van Horn, Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”.

2. Model Mazmanian dan Sabatier, Danial Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan”. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni: Variabel *independen*; mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki. Variabel *intervening*; kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan *implementor* kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan

kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana. Variabel *dependen*; tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Grindle, Merilee S. Grindle (1980), yang menegaskan bahwa: “Keberhasilan proses *implementasi* kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contyex of Implementation* (konteks Implementasi). *Content of Policy* (Isi kebijakan).

4. Model George Edwards III, Menurut George Edward III dalam Widodo (2011:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Untuk mengkaji keberhasilan dalam implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di SMPN 3 Doplang, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut George Edward III dalam Widodo (2011:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi:

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2011:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2011:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

- 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2011:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

- 2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2011:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya

“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2011:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2011:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2011:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo

(2011:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Edward III dalam Widodo (2011:104-105) mengatakan bahwa:

“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pasal 1 tentang bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di SMPN 3 Doplang Kabupaten Blora, dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III

Metode

Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Doplang Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah guru PNS di SMPN 3 Doplang Kabupaten Blora. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju atau yang lebih dikenal dengan *Snowball Sampling*. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu diperoleh melalui observasi dan wawancara dari waka kurikulum dan 6 PNS di SMPN 3 Doplang, sedangkan data sekunder didapatkan dari data dokumentasi dan arsip-arsip penting.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti dengan melakukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kondisi sekolah dalam proses

implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pasal 1 tentang tugas-tugas utama guru di SMPN 3 Doplang Kabupaten Blora.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan langkah-langkah reduksi data (reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pentransformasian data kasar di lapangan), penyajian data (penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matrik, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan), verifikasi data dan menarik kesimpulan).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti memaparkan hasil temuan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai informan mengenai implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pasal 1 tentang tugas utama guru. Adapun deskripsi hasil dari penelitian ini ada 4 indikator dari teori George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut teori George C. Edward ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu Sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan (*clarity*) dan konsistensi. Peneliti akan mengaitkan ketiga sub komponen tersebut dalam proses implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan

Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah khususnya pasal 1 mengenai tugas utama guru di SMPN 3 Doplang Kecamatan Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dihimpun, komunikasi antar personal yang terjadi di SMP Negeri 3 Doplang sangat jelas dan sudah berjalan baik, hal ini dapat dipahami dari jawaban beberapa informan. Informan berusaha mengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan Tugas Utama Guru sebagai guru profesional, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut. Karena, komunikasi yang kurang baik akan menimbulkan masalah sehingga muncul sebuah kesalahpahaman.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor komunikasi dalam implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik. Transformasi kebijakan ini sudah dilakukan melalui sosialisasi kepala sekolah dan himbuan dilakukan setiap saat khususnya di setiap ada rapat dinas tingkat sekolah. Dari pihak pelaksana kebijakan sudah memahami apa yang diinginkan oleh pimpinan dan memahami isi dan tujuan dari kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Dan semua guru berkomitmen untuk selalu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional seperti yang diamanatkan dalam Permendikbud tersebut.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh bahwa sumber daya manusia yang ada

belum cukup terpenuhi. Dari jumlah 19 guru yang ada 8 guru berstatus PNS, 1 K2, 1 P3K, 8 gtt. Ada 4 mata pelajaran yang belum ada guru PNS, Penjaskes, BK, Bahasa Indonesia, dan SBK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMPN 3 Dopleng masih kekurangan jumlah guru PNS. Kekurangan jumlah guru ini tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Untuk saat ini kekurangan guru PNS dapat diampu oleh non PNS atau GTT. Untuk saat ini kekurangan guru PNS dapat diampu oleh non PNS atau GTT.

Kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran daring juga masih ada kendala diantaranya beberapa guru yang masih minim pengetahuan teknologi (gaptek), lemahnya dalam penguasaan aplikasi pembelajaran online, disamping dari pribadi guru sendiri masih ada guru yang kurang bersemangat dalam belajar untuk bisa menguasai aplikasi pembelajaran online. Selaras dengan kondisi real mengenai sarana prasarana penunjang pembelajaran online yang belum memadai. Keterbatasan jumlah printer dan komputer yang ada di sekolah, lemahnya koneksi internet, bahkan lemahnya sinyal ini tidak hanya wifi sekolah tetapi mencakup seluruh wilayah di Kelurahan Bangkleyan. Jadi belum maksimalnya kinerja guru dalam pembelajaran daring lebih disebabkan karena minimnya kemampuan guru dalam penguasaan aplikasi pembelajaran dan kondisi sinyal internet yang kurang memadai.

Sedangkan dukungan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja guru, berupa bantuan kuota internet dari pemerintah dan sekolah. Sekolah juga membantu transport ketika guru sedang melakukan pelatihan kompetensi ditingkat kabupaten maupun propinsi yang sudah dianggarkan dalam RAKS.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sumber daya implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, bahwa faktor sumber daya belum terpenuhi dengan baik. Kekurangan jumlah guru PNS di empat mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi penguasaan aplikasi pembelajaran daring yang belum optimal, keterbatasan sarana prasarana sekolah sebagai pendukung terlaksananya peningkatan kinerja guru serta jaringan internet yang belum memadai.

3. Disposisi

Dengan situasi pandemik yang sudah terjadi lebih dari satu tahun, sekolah belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dipilih pemerintah untuk menekan persebaran covid-19. Pada masa pandemi seperti sekarang ini memang bisa kita sadari bersama bahwa kemampuan seorang guru untuk menyampaikan materi secara daring tidak maksimal. Bagaimana langkah-langkah konkret kita sebagai seorang guru yang berintegritas untuk tetap menjaga, mengawasi dan mengontrol siswa agar tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dan tanggung jawab terhadap tugas belajarnya.

Hasil wawancara dengan narasumber beberapa guru di SMPN 3 Doplang, menyatakan komitmennya sebagai seorang pendidik profesional yang punya tugas mulia mencerdaskan anak bangsa apalagi guru PNS di sini sudah semua bersertifikat pendidik. Kondisi pandemi covid19 menjadi tantangan bagi guru untuk belajar dan meningkatkan kemampuan IT nya dalam rangka pembelajaran daring bisa berlangsung. Meskipun masih ada ditemukan oknum guru tertentu yang dilihat dari kemampuan baik tetapi dari sisi kemauan masih belum optimal.

Yang tidak kalah pentingnya adanya keteladanan pimpinan atau kepala sekolah SMPN 3 Doplang, keteladanan kepala sekolah adalah sikap dan tingkah laku pemimpin, ucapan maupun perbuatan yang dapat di tiru dan di teladani oleh bawahannya. Kepala sekolah memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas kerja guru. Dan kepala sekolah selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif demi kenyamanan dan kepuasan kerja sehingga nantinya bisa meningkatkan kinerja guru.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai disposisi para pelaksana kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 khususnya pasal 1 tentang implementasi tugas utama guru di masa pandemi covid 19 sudah terlaksana dengan baik. Keteladanan kepala sekolah sebagai pimpinan sangat dibutuhkan dalam memotivasi guru dalam melaksanakan tugas, dan itu sudah dilakukan dengan baik. Guru menyatakan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas utamanya

meskipun serba dalam keterbatasan. Kondisi pandemi covid19 memaksa para guru tertantang untuk selalu meningkatkan kemampuan khususnya kemampuan aplikasi pembelajaran online. Sebagai catatan masih ada oknum guru yang sebenarnya berkemampuan baik namun dari sisi kemauan yang masih belum optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan garis komando, arah hubungan serta pola koordinasi antar unit kerja dalam sebuah organisasi. Aspek penting dalam struktur birokrasi adalah adanya *Standard Operating Procedures (SOP)* atau prosedur standar pelaksanaan dan fragmentasi atau pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi. Ketersediaan aturan jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara dengan informan, implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pasal 1 tentang Tugas Utama Guru di SMPN 3 Doplang ini sifatnya *top down*, artinya kebijakan berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud turun ke bawah pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, turun ke sekolah dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan diturunkan ke pelaksana paling bawah yaitu staf atau guru. Dalam pelaksanaannya guru bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.

Fragmentasi adalah pembagian tugas dan bertanggungjawab terhadap sebuah kebijakan dalam sebuah unit kerja dalam organisasi. Semakin banyak pelaku dan agensi yang terlibat dan semakin mandiri keputusan masing-masing mereka buat, semakin kecil kemungkinan implementasi kebijakan sukses untuk dilaksanakan. Adapun konsekuensi fragmentasi atau pembagian tugas dan tanggungjawab adalah adanya penyebaran tanggungjawab, hal ini akan membuat koordinasi sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber fragmentasi atau pembagian tugas dalam implementasi kebijakan peningkatan kinerja guru di SMPN 3 Doplang dibantu oleh waka kurikulum selaku koordinator program pembelajaran dan guru senior membantu menilai dalam penilaian kinerja guru.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk *Standar Operational Procedures (SOP)* dan pembagian tanggung jawab (fragmentasi) pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 di SMPN 3 Doplang, sudah melaksanakan struktur birokrasi yang baik. Karena dalam implementasi kebijakan ini sudah ada panduan dan pembagian kewenangan yang jelas.

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan data tentang implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pasal 1 tentang tugas utama guru, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Indikator komunikasi

(transformasi, kejelasan, konsistensi) terlaksana dengan baik, indikator sumberdaya (Jumlah staf dan kompetensi, sarana prasarana, dan anggaran) belum terlaksana dengan baik, indikator disposisi (komitmen) terlaksana dengan baik, indikator struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi) terlaksana dengan baik. Perlunya komitmen bersama antara kepala sekolah, guru, pemerintah dalam perekrutan PNS baru yang berkualitas dan komitmen dalam pemenuhan sarana prasana sekolah dalam upaya peningkatan kinerja guru.

Daftar Pustaka

- Solichin Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. FISIPOL: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Yulianto Kadji, M.Si. 2015 *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*,

Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, PENERBIT

TIMUR SUMENEP MADURA.
ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN
2407-6864 (Online) Volume 8
Nomor 2

Jurnal:

Bahral Djirimu. 2015. *Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah 2 Palu*, 75 e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 74-83

Didin Muhafidin. 2020. *Pengaruh Implementasi kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Panagandaran*. e ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020

Endah Christianingsih. 2018. *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung*. JIMIA. Vol 12 No 2

Nunuk Hariyati. 2021. *Implementasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Masa Pandemi Covid 19 di SMAN 1 Sidoarjo*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 09 Nomor 04 Tahun 2021, 846-858

Rini Aristin & Rina Nur Azizah. 2018. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KADUARA*

Sarah Busyra dan Lutfiah Sani. 2020. *“Kinerja Mengajar dengan Sistem Work From Home (WFH) pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta”*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 3 No. 01, 2020, 3.

Suwardi. 2020. *Kepemimpinan Kota Surakarta 2020 – 2025 Identifikasi Karakteristik Calon Wali Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat*.

Fenny Murti Mamero, dkk. 2018. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI*

SMK NEGERI 5 MANADO

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/20037/1964> 5.

Bahral Djirimu.2016. *Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah 2*. <https://media.neliti.com/media/publications/143522-ID-implementasi-kebijakan-kompetensi-guru-d.pdf>

Mulyono Yalia. 2014. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MEDIA TRADISIONAL DI JAWA BARAT*.

- Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014:
149-160
- Nursalaim. 2017. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR CIKATOMAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017.*
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1671/1349>
- Peraturan/Perundang-undangan:
- Pemendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- Web:**
- Guru pendidikan.com,
22/3/2021.
Tahap,
:
- Respon,
Tipe,
Evaluasi,
Pengertian*
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/>
- Putri AR. 2020. *Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan ciri-ciri, posting 6/2/2020,*
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik-pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri> Suwitri.
- Thabroni G. 2021. *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah dan Macam,*
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.* Yogyakarta